

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 1, Juli - Desember 2008

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Jl. Johari I No. 8, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta 12240

Tel: (021) 726 2908 E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Sunaryo

Redaktur Pelaksana

Muhamad Wahyuni Nafis • Abdul Hakim

Dewan Redaksi

Abdul Hakim • Budhy Munawar-Rachman •
Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer • Moh. Monib •
Muhamad Wahyuni Nafis • Sunaryo •
Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman ukuran A-4 dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 2, Januari - Juni 2009

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Pengantar	5-9

SAJIAN KHUSUS

Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi: Suatu Percobaan Pendekatan Sistematis terhadap Konsep Antropologis Islam <i>Nurcholish Madjid</i>	13-46
Kalam Kekhalifahan Nurcholish Madjid <i>Mujiburrahman</i>	47-67
Kekhalifahan dan Tanggung Jawab Global: Menimba Inspirasi dari Mata Air Warisan Nurcholish Madjid <i>Yunasril Ali</i>	69-85

ARTIKEL

Menampilkan Agama Berwajah Ramah <i>Kautsar Azhari Noer</i>	89-114
Rekonstruksi Toleransi: Dari Toleransi sebagai <i>Modus Vivendi</i> menuju <i>Value</i> <i>Zuhairi Misrawi</i>	115-124

DAFTAR ISI

Hak-hak Minoritas, Negara dan Regulasi Agama <i>Ismatu Ropi</i>	125-138
Multikulturalisme vs <i>Nation-State</i> <i>Abdul Hadi W.M.</i>	139-160
Agama dan Kebangsaan: Mewujudkan Misi Profetik dalam Kehidupan Publik <i>Yudi Latif</i>	161-174
Pembaruan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid dan Isu-isu Gender <i>Budhy Munawar-Rachman</i>	175-188
Membuat Hidup Bermakna <i>Sri Dalai Lama Keempat-belas</i>	189-192

RESENSI BUKU

Ahl al-Kitāb: Sejarah yang Terlupakan <i>Zuhairi Misrawi</i>	195-199
---	---------

KALAM KEKHALIFAHAN NURCHOLISH MADJID

Mujiburrahman

Ketika Nurcholish Madjid (selanjutnya disebut Cak Nur) menyerahkan perlunya pembaruan pemikiran Islam di awal tahun 1970-an, sudah nampak sekali bahwa ia berbicara sebagai seorang teolog Muslim. Studi yang kemudian dijalannya di Universitas Chicago, terutama bersama Fazlur Rahman, jelas semakin memperkuat bakat teologisnya, karena di sana ia mempelajari tradisi pemikiran Islam klasik, khususnya kalam, falsafah dan tasawuf. Dalam periode ini Cak Nur bahkan menerjemahkan beberapa risalah yang ditulis para pemikir Muslim klasik itu ke dalam Bahasa Indonesia, dan memberikan sebuah kata pengantar panjang yang apresiatif dalam menggambarkan kesinambungan dan perubahan yang terjadi dalam sejarah pemikiran Islam.¹ Di sisi lain, Cak Nur sangat sedikit mencurahkan perhatiannya kepada hukum Islam (fiqh). Lebih tepatnya, Cak Nur lebih tertarik kepada sisi filosofis dari hukum Islam ketimbang rumusan-rumusan hukum Islam yang bersifat praktis bagi kehidupan kaum Muslim sehari-hari.

Pidato Cak Nur yang disampaikan pada 10 Agustus 1998 dalam rangka pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Falsafah dan Kalam di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah dapat dilihat sebagai suatu pengakuan formal bagi kepakarannya sebagai

¹ Nurcholish Madjid, ed., *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

seorang teolog. Pidato tersebut diberi judul “Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi: Suatu Percobaan Pendekatan Sistematis terhadap Konsep Antropologis Islam”.² Dalam judul ini Cak Nur tidak menggunakan istilah “teologi” melainkan istilah yang lebih akrab dalam tradisi Islam, yaitu “kalam”. Demikianpula kata “kekhalfahan” berasal dari istilah al-Qur’an yang barangkali hanya dimengerti oleh kalangan terbatas. Tetapi kata ini kemudian agak diperjelas oleh anak judul, yaitu “konsep antropologis Islam”. Sedangkan kata “reformasi” jelas sengaja dipilih dalam konteks sosial politik saat itu, yaitu lahirnya Era Reformasi yang ditandai oleh pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998 dimana Cak Nur memainkan peranan yang cukup penting.

Ide-ide yang dikemukakan Cak Nur dalam pidato ini sebenarnya sudah dikemukakannya dalam berbagai makalah yang disampai-kannya sejak ia kembali dari Chicago sekitar pertengahan tahun 1980-an.³ Karena itu bagi orang-orang yang sudah banyak mengenal pemikiran Cak Nur di masa sebelumnya, pidato ini mungkin hampir tidak mengandung sesuatu yang baru lagi. Tetapi sebagai sebuah pidato pengukuhan Guru Besar, pidato ini tetaplah penting, terutama jika ia dapat dilihat sebagai salah satu masalah utama yang menjadi perhatian Cak Nur sebagai seorang pemikir Islam. Pidato pengukuhan Guru Besar biasanya dihadiri oleh orang-orang terpelajar dan terkemuka. Karena itu mustahil jika dalam kesempatan tersebut Cak Nur memilih suatu pokok bahasan yang tidak begitu penting dalam pemikirannya selama ini.

Tulisan ini mencoba untuk mengapresiasi konsep-konsep teologis Cak Nur mengenai kalam kekhalfahan dengan memfokuskan telaah pada naskah pidato di atas, ditambah dengan merujuk kepada tulisan-

² Nurcholish Madjid, “Kalam Kekhalifahan dan Reformasi Bumi: Suatu Percobaan Pendekatan Sistematis terhadap Konsep Antropologis Islam” (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998).

³ Lihat misalnya, “Konsep-Konsep Antropologis dalam al-Qur’an” dalam Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992), 300-311; dan “Makna Kejatuhan Manusia ke Bumi” dalam Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 145-159.

tulisannya yang lain guna mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Pada saat yang sama, wacana Cak Nur tentang kalam kekhalfahan ini akan dianalisis secara kritis, mulai dari argumentasi, substansi pemikirannya, hingga kemungkinan relevansinya bagi masyarakat Indonesia.

Menyikapi Tradisi dan Godaan Apologi

Mengapa topik kekhalfahan manusia ini penting? Cak Nur menyebutkan sedikitnya dua alasan: *pertama*, kurangnya pembahasan masalah ini dalam khazanah ilmu kalam klasik, dan *kedua*, dengan mengelaborasi pokok bahasan ini, kaum Muslim diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha perbaikan kehidupan umat manusia. Untuk alasan pertama, Cak Nur mengatakan:

Dari khazanah pemikiran klasik tidak didapatkan elaborasi yang memadai tentang kekhalfahan manusia selain yang ada dalam kitab-kitab tafsir dengan tingkat keluasan dan kedalaman yang berbeda-beda. Hal ini cukup mengherankan mengingat demikian sentralnya masalah kekhalfahan manusia itu dalam pandangan antropologis al-Qur'an. Tetapi mungkin karena tidak pernah menjadi bahan polemik dan kontroversi yang cukup gawat, kekhalfahan manusia itu dianggap tidak mengandung persoalan sehingga dorongan untuk menjabarkan dan mengembangkan pemahamannya terdesak ke belakang oleh topik-topik yang lebih polemis dan kontroversial.⁴

Barangkali akan menarik jika pandangan Cak Nur di atas kita kontraskan dengan pandangan pemikir Mesir, Hassan Hanafi. Seperti Cak Nur, Hanafi juga menemukan tiadanya pembahasan mengenai manusia dalam pemikiran Islam klasik seperti yang dapat dibaca dalam artikelnya berjudul *Limādzā Ghāba Mabḥats al-Insān*

⁴ Madjid, "Kalam Kekhalifahan", h. 11.

fi Turātsina al-Qadīm? (“Mengapa Pembahasan tentang Manusia Tidak Ada dalam Tradisi Lama Kita?”).⁵ Namun, berbeda dengan Cak Nur, Hanafi lebih tegas mengatakan bahwa pemikiran Islam klasik tidak pernah menjadikan manusia sebagai pokok bahasan yang berdiri sendiri (*ka mabḥats mustaqill*). Juga berbeda dengan Cak Nur, bagi Hanafi sebab dari tiadanya manusia sebagai pokok bahasan dalam wacana pemikiran Islam klasik bukan karena ia dianggap tidak mengandung persoalan, melainkan karena “ulah” para ulama sendiri yang menyembunyikan manusia di balik berbagai tirai dalam ilmu kalam, fiqh, filsafat dan tasawuf. Karena itu bagi Hanafi, untuk menampilkan manusia dalam pemikiran Islam, tugas pertama yang harus dilakukan adalah menyingkap tabir-tabir yang menutup itu. Berbagai istilah dan pokok bahasan yang ada dalam ilmu kalam, fiqh, filsafat dan tasawuf harus dibongkar guna menampilkan posisi sentral manusia. Baru kemudian, seperti yang ditempuh Cak Nur, Hanafi menyarankan perlunya merujuk kepada ayat-ayat al-Qur’an yang banyak sekali berbicara tentang manusia.

Sebenarnya, baik Cak Nur maupun Hanafi dua-duanya tidak memberikan jawaban historis yang memuaskan terhadap pertanyaan mengapa manusia tidak menjadi topik sentral wacana pemikiran Islam di masa lampau. Penelitian yang mendalam terhadap masalah ini masih terbuka lebar. Terlepas dari masalah ini, apakah kontras antara pandangan kedua tokoh ini punya implikasi penting? Sepertinya memang demikian, terutama dilihat dari sudut persamaan dan perbedaan strategi kedua tokoh ini dalam menyikapi tradisi pemikiran Islam (*al-turāts*). Bagi Hanafi, tiadanya pembicaraan manusia sebagai pokok bahasan tersendiri dalam tradisi Islam merupakan suatu “kesalahan” yang harus dikoreksi. Namun pada saat yang sama, akar-akar tradisi itu tetap harus dipertahankan karena ia merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kaum Muslim. Jadi yang dibutuhkan bukannya membuang tetapi mengkritik dan mem-

⁵ Artikel ini pertama terbit dalam *al-Mustaqbal al-‘Arabī* (Oktober, 1979), kemudian diterbitkan ulang dalam kumpulan tulisan Hassan Hanafi, *Dināsāt Islāmiyyah* (Beirut: Dar al-Tanwir, 1982), h. 299-315.

bangun ulang tradisi itu agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Sejalan dengan Hanafi, Cak Nur juga setuju bahwa tradisi pemikiran klasik tidak boleh dibuang begitu saja. Tetapi berbeda dengan Hanafi, Cak Nur cenderung lebih santun karena ia dalam kasus ini sama sekali tidak “menyalahkan” tradisi, dan karena itu ia tidak merasa perlu berpayah-payah mengkritik tradisi pemikiran Islam yang ada. Bagi Cak Nur, masalah manusia, atau lebih tepatnya, kekhalifahan manusia, tidak menjadi wacana penting bagi para ulama dahulu hanyalah karena masalah ini dianggap sudah *taken for granted*. Ironisnya, alasan ini kemudian menggiring Cak Nur kepada suatu apologi.

Seperti dikatakan pada awal orasi, khazanah Islam klasik menganggap masalah kekhalifahan manusia tidak mengandung persoalan polemis dan kontroversial. Bagi mereka masalah itu sudah “*taken for granted*” karena mereka merasakan dan mengetahui keunggulan mereka di bidang kemanusiaan itu atas bangsa-bangsa dan umat-umat yang lain. Jauh sebelum Thomas Jefferson memberi inspirasi kepada rakyat Amerika dengan prinsip “*life, liberty and persuit of happiness*”-nya, dan sebelum John Lock mengotak-atik asas-asas “*life, liberty and property*”, umat Islam telah lama memegang teguh dan melaksanakan ajaran tentang kesucian *al-dimāʾ, al-amwāl wa al-aʾrād* (hidup, harta, kehormatan—*life, property and honour*).⁶

Bahkan begitu pentingnya “kalam kekhalifahan” itu sehingga Cak Nur berkata:

Pada zaman sekarang, masalah kekhalifahan manusia itu patut sekali dikembangkan pemahamannya, mengingat potensinya untuk menjadi pangkal sumbangan kaum Muslim terhadap masalah umat manusia sekarang ini. Sebagai agama yang paling

⁶ Madjid, “Kalam Kekhalifahan”, h. 37.

cepat berkembang di muka bumi, yang meliputi praktis semua unsur ras dan budaya, Islam memiliki kesempatan untuk benar-benar ikut aktif menyelesaikan persoalan dunia.⁷

Pernyataan-pernyataan Cak Nur di atas jelas bernada apologis. Ia terjebak pada pembacaan masa lalu untuk menjustifikasi masa kini (kemodernan), sehingga melahirkan semacam idealisasi sejarah. Benarkah secara historis bahwa kalam kekhalifahan tidak menjadi wacana penting di masa lalu karena kaum Muslim “merasakan dan mengetahui keunggulan mereka di bidang kemanusiaan itu atas bangsa-bangsa dan umat-umat yang lain”? Lagi pula, apa artinya mengatakan bahwa kalam kekhalifahan ternyata sudah mendahului ide-ide humanis dari Thomas Jefferson dan John Lock jika kita menyadari bahwa dalam kenyataan empiris, umat Islam justru dalam banyak kasus masih jauh tertinggal dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan itu? Demikian pula dalam kondisi dunia yang dilanda hegemoni Barat saat ini, apa artinya membanggakan diri bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam dapat menjadi sumbangan penting bagi penyelesaian persoalan dunia?

Pernyataan-pernyataan itu barangkali tidak lebih dari sekadar pelipur lara saja. Inilah yang dikatakan Cak Nur sendiri dalam artikelnya “Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia” yang menghebohkan di awal tahun 1970-an, ketika ia mengkritik konsep negara Islam sebagai sebuah apologi. Cak Nur mengatakan:

Apologi itu rupanya diperlukan karena dalam kehidupan modern yang didominasi oleh pola kehidupan Barat itu, segi paling tinggi ialah segi politik, ekonomi, sosial ataupun segi-segi lainnya, selain segi spiritual. Dapat dipahami bahwa invasi kultural yang dahsyat itu menghancurkan rasa harga diri umat Islam yang justru dalam bidang-bidang tersebut amat terbelakang, sehingga menimbulkan rasa rendah diri. Maka apologi

⁷ Madjid, “Kalam Kekhalifahan”, h. 11.

itu merupakan kompensasi rasa rendah diri. Sebab, dengan apologi yang melahirkan apresiasi ideologis politis yang totaliter itu, umat Islam (melalui apologi-apologi) mencoba membuktikan bahwa Islam ternyata lebih unggul, setidaknya setara dengan peradaban Barat dengan ideologi-ideologi modernnya, dalam hal yang menyangkut ekonomi, politik, sosial dan lain-lain, yaitu bidang-bidang yang justru umat Islam mengalami kekalahan total. Sebagai suatu apologi, pikiran-pikiran itu hanya mempunyai efektifitas yang berumur pendek. Setelah secara sementara memberikan kepuasan serta harga diri kepada kaum Muslimin, pikiran-pikiran itu akhirnya ternyata palsu, sehingga bagaikan bumerang, memukul kembali umat Islam.⁸

Jadi Cak Nur akhirnya melakukan apologi yang dulu ia kritik. Mengapa apologi seringkali menghinggapi pemikiran Islam modern? Selain alasan rendah diri seperti yang dikemukakan Cak Nur di atas, boleh jadi apologi juga digunakan sebagai strategi persuasif agar sebuah wacana bisa diterima dengan lebih mudah oleh umat Islam. Cak Nur sudah cukup kenyang menerima kritik-kritik tajam bahkan konon ancaman terhadap keselamatan dirinya sebagai reaksi negatif terhadap ide-ide yang dilontarkannya. Karena itu boleh jadi nada-nada apologis dalam beberapa tulisan Cak Nur memiliki tujuan persuasif. Dari kutipan-kutipan di atas dapat dilihat bahwa apa yang disebut Cak Nur dengan “kalam kekhalifahan” tidak lain dari suatu rumusan teologi Islam tentang humanisme. Cak Nur sepertinya secara persuasif ingin menegaskan bahwa nilai-nilai humanis yang menjadi dasar bagi peradaban Barat modern sebenarnya sudah ada dalam tradisi keagamaan kaum Muslim, bahkan jauh sebelum abad modern itu lahir. Karena itu kaum Muslim sudah sepantasnya menjadi humanis, dan bahkan dapat menyumbangkan kekayaan nilai-nilai humanis yang dimilikinya itu bagi kebaikan seluruh umat manusia. Strategi persuasif ini juga bisa dilihat pada usaha Cak Nur

⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), h. 254.

dalam menggunakan istilah-istilah Islam (Arab) seperti “kalam” dan “kekhalifahan” ketimbang “teologi” dan “humanisme”.⁹ Boleh jadi tujuan “pengaraban” istilah-istilah ini adalah agar humanisme yang ditawarkannya dapat diterima sebagai benar-benar otentik Islam, bukan sesuatu yang dipinjam dari luar.

Tetapi apapun alasannya, saya kira sudah saatnya para pemikir Muslim meninggalkan strategi apologis yang cenderung tidak mendewasakan itu. Agar terhindar dari apologi, maka masa lalu harus dibaca dalam kerangka dan konteks masa lalu itu sendiri, bukan dengan kerangka masa kini. Jika kita membaca masa lalu dengan standar-standar masa kini, maka kita akan dengan mudah terjebak pada dua kemungkinan ekstrim: mengidealisasi sejarah atau mencaci-makinya. Selain itu, kaum Muslim sebaiknya melihat tradisi Islam dan tradisi Barat dalam kerangka sejarah sosial, budaya dan politiknya masing-masing. Tradisi Islam harus dipelajari dan diapresiasi tanpa kehilangan sikap kritis. Kajian mendalam tentang dinamika pemikiran Islam sepanjang sejarah patut digalakkan sebagai upaya mempertahankan kesinambungan sekaligus mengambil pelajaran dari contoh-contoh pergumulannya di masa lampau. Di sisi lain, kaum Muslim memang sangat perlu mempelajari sejarah dan kebudayaan Barat yang kini mendominasi dunia. Inisiatif Hanafi untuk menulis tentang Oksidentalisme, yakni Barat sebagai objek kajian, patut kita apresiasi.¹⁰ Namun kajian Hanafi masih banyak berkisar pada filsafat Barat, sementara yang lebih diperlukan saat ini adalah kajian kemasyarakatan yang lebih luas.

⁹ Menarik sebagai perbandingan, Harun Nasution, seorang teolog Muslim terkemuka di zaman Orde Baru, mengatakan: “Karanganku diperuntukkan orang atas, bukan orang awam. Maka tak kusebutkan istilah tasawuf, tetapi mistisisme. Karena kalau kusebut tasawuf, golongan atas itu tidak tertarik. Begitu pula teologi, tak kusebut ilmu kalam.” Aqib Suminto et. al., *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution* (Jakarta: LSAF, 1989), h. 60-61. Seperti Harun, audiens Cak Nur umumnya juga kalangan menengah ke atas, namun dalam kasus ini nampaknya Cak Nur memilih strategi yang berbeda.

¹⁰ Hassan Hanafi, *Muqaddimah fi 'Ilm al-Istighrāb* (Kairo: Al-Dār al-Fan-niyah, 1991).

Eklektisisme Argumen Cak Nur

Terlepas dari persoalan apologi, pokok-pokok pikiran kalam kekhalifahan yang dipaparkan Cak Nur secara substansial cukup berbobot, dan sebagai suatu rumusan teologi yang bersandar pada argumentasi wahyu dan nalar juga cukup meyakinkan. Dalam mengolah argumen-argumennya, Cak Nur dengan leluasa menggunakan berbagai sumber, termasuk ayat-ayat al-Qur'an, hadits dan pendapat-pendapat para ulama. Di antara tokoh-tokoh klasik, Ibn Taimiyah nampak selalu membayangi pemikiran Cak Nur, barangkali karena karya-karya tokoh ini banyak dibaca oleh Cak Nur untuk keperluan penulisan disertasi doktornya. Selain itu, Ibn Taimiyah memang dikenal luas sebagai tokoh yang menjadi rujukan para pembaru Islam termasuk bagi Fazlur Rahman, pembimbing akademik Cak Nur ketika studi di Chicago.¹¹ Di sisi lain, Cak Nur nampaknya tidak pernah mau terikat dengan sistem pemikiran seorang tokoh secara keseluruhan. Ia lebih suka mengutip secara eklektik berbagai pendapat para tokoh yang dianggapnya dapat mendukung pandangannya sendiri, meskipun dalam poin-poin tertentu tokoh-tokoh tersebut sebenarnya bertentangan satu sama lain.

Eklektisisme Cak Nur nampaknya dijustifikasi oleh pandangan yang dipaparkan pada bagian awal pidatonya bahwa peradaban Islam klasik sangat bersifat kosmopolit karena kaum Muslim dengan penuh percaya diri menyerap berbagai peradaban umat manusia guna memperkaya peradaban Islam itu sendiri. Keterbukaan kaum Muslim tersebut, menurut Cak Nur, bukan sesuatu yang lahir begitu saja, melainkan memiliki landasan teologis yang kuat, yakni pandangan bahwa kebenaran itu bersifat universal. Dalam Islam, ada kebenaran agama yang berasal dari wahyu kenabian (*nubuwwah*), di samping itu diakui pula adanya kebenaran di luar kenabian yang

¹¹ Kekagumannya pada Ibn Taimiyah antara lain dapat dilihat dalam Fazlur Rahman, *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1958), 102; dan Fazlur Rahman, *Revival and Reform in Islam: a Study of Islamic Fundamentalism* (Oxford: Oneworld, 2000), 155-156.

disebut *al-hikmah*. Cak Nur kemudian mengutip sebuah hadits yang menegaskan bahwa “*al-hikmah* adalah barang-hilangnya kaum beriman, sehingga siapa saja dari mereka yang menemukannya adalah juga yang paling berhak memungutnya.”¹² Di sini nampaknya Cak Nur ingin menegaskan bahwa berbagai pendapat pemikir Muslim dan non-Muslim adalah butir-butir *al-hikmah* yang selayaknya dipungut jika ia sejalan dengan kebenaran *nubuwwah*, atau dalam kasus pidato ini, kebenaran *nubuwwah* seperti yang dipahami oleh Cak Nur.

Kesan eklektik itu bahkan sudah terasa ketika Cak Nur berusaha menjelaskan pandangannya tentang universalitas kebenaran di atas. Di sini Cak Nur tanpa canggung mempertemukan pandangan Ibn Taimiyah dan Ibn Rusyd meskipun ia tentu sadar bahwa yang pertama menolak penggunaan filsafat Yunani untuk memahami agama, sedangkan yang kedua berusaha mempertemukan keduanya. Cak Nur sangat terkesan dengan pandangan Ibn Taimiyah bahwa agama adalah fitrah yang diturunkan (*fitrah munazzalah*) dalam rangka membimbing fitrah yang sudah ada pada setiap diri manusia (*fitrah majbūlah*). Dalam bahasa Cak Nur, fitrah pertama adalah “agama yang benar dan konsisten” sebagai wujud dari “kemanusiaan universal yang suci”, sedangkan fitrah kedua (yang dapat melahirkan *al-hikmah*) disebutnya sebagai “penciptaan asal yang suci dari Allah”. Dua jenis fitrah ini pada hakikatnya identik sehingga Cak Nur menyimpulkan bahwa “agama kebenaran ialah agama kemanusiaan universal, atau sebaliknya, kemanusiaan universal adalah agama kebenaran.”¹³ Dalam pidatonya ini Cak Nur memang tidak secara eksplisit merujuk kepada Ibn Taimiyah perihal konsep fitrah tersebut, meskipun dalam buku-bukunya yang lain, Cak Nur secara terbuka menyebutkannya.¹⁴ Barangkali di sini Cak Nur menyadari bahwa penyebutan Ibn Taimiyah akan menimbulkan kesan kontradiksi

¹² Madjid, “Kalam Kekhalifahan”, h. 7.

¹³ Madjid, “Kalam Kekhalifahan”, h. 6-7.

¹⁴ Lihat misalnya Madjid, *Islam, Doktrin*, h. xiii; 213; Madjid, *Islam Ke-modernan*, h. 8; dan yang paling awal tentu disertasi Cak Nur, “Ibn Taymiyya on Kalam and Falsafa: A Problem of Reason and Revelation in Islam” (PhD thesis, University of Chicago, 1984), h. 81; 218-221.

karena ia kemudian mengutip Ibn Rusyd yang mensejajarkan antara *al-hikmah* dan *syari'ah*, yakni antara falsafah dan agama.¹⁵ Jelas bahwa bagi Ibn Taimiyah fitrah bawaan manusia yang suci itu tidak sejajar dengan kebenaran falsafah.

Usaha Cak Nur untuk memaparkan dan menafsirkan cerita Adam di dalam al-Qur'an secara metaforis juga dapat dinilai sebagai bersifat eklektik. Peristiwa penciptaan Adam, kelebihan Adam dibanding para malaikat karena ia diajari Tuhan "nama-nama", keengganan Iblis sujud kepada Adam hingga kejatuhan Adam dan Hawa dari surga karena memakan buah terlarang, semua ini dilukiskan Cak Nur sebagai sebuah "drama kosmis". Tulisan Cak Nur yang lebih awal tentang topik ini ternyata jauh lebih lengkap pembahasannya ketimbang cerita Adam yang disajikan dalam pidato ini. Dalam tulisan yang lebih awal itu, Cak Nur bahkan menjelaskan adanya kesamaan dan perbedaan antara cerita Adam dan Hawa dalam al-Qur'an dengan yang di Perjanjian Lama.¹⁶ Tetapi dalam pidato ini ada hal lain yang lebih ditonjolkan Cak Nur, yaitu perlunya penafsiran metaforis terhadap cerita ini secara khusus, dan ayat-ayat al-Qur'an secara umum, sebab "firman Allah disebut 'ayat' yang berarti pertanda atau perlambang, maka penuturan al-Qur'an itu harus ditanggapi sebagai pertanda atau perlambang untuk makna-makna yang lebih dalam."¹⁷ Dalam konteks ini Cak Nur, misalnya, mengartikan "*jannah*" tempat tinggal Adam dan Hawa bukanlah sebagai surga tempat kebahagiaan abadi yang dijanjikan Tuhan untuk orang-orang saleh kelak di akhirat, melainkan "lokus primordial". Demikian pula "pohon terlarang" bagi Adam dan Hawa adalah "pohon kesadaran", dan "kalimat-kalimat" yang diajarkan Tuhan kepada Adam setelah ia dan isterinya jatuh dari *jannah* ke bumi adalah "agama".¹⁸

¹⁵ Lihat Ibn Rusyd, *Fashl al-Maqāl fī Mā bayn al-Hikmah wa al-Syari'ah Min al-Ittishāl* disunting oleh Muhammad 'Imarah (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1969).

¹⁶ Madjid, *Islam Agama Peradaban*, h. 145-150.

¹⁷ Madjid, "Kalam Kekhalifahan", h. 14.

¹⁸ Madjid, "Kalam Kekhalifahan", h. 12-15.

Untuk mendukung perlunya penafsiran metaforis itu, Cak Nur lagi-lagi mengutip tokoh-tokoh secara eklektik. Pertama, ia mengutip pandangan tiga sarjana Barat, yakni Ian Netton, Karen Armstrong dan Annemarie Schimmel, untuk mendukung pendapatnya mengenai pentingnya melihat ayat-ayat al-Qur'an sebagai pertanda. Selanjutnya, Cak Nur merujuk kepada Ibn Taimiyah untuk menegaskan pentingnya mengambil “*ibrah* (makna atau pelajaran yang harus diseberangi ke sebelah ungkapan kebahasaannya).”¹⁹ Mengutip tiga sarjana Barat mungkin menunjukkan bahwa pendapat mereka bagi Cak Nur termasuk kategori “*al-hikmah*”. Sedangkan Ibn Taimiyah dikutip Cak Nur nampaknya sebagai upaya menjustifikasi penafsiran metaforis dengan merujuk kepada orang yang justeru dikenal sebagai tokoh literalis Islam. Di sini Cak Nur cukup cerdik karena ia merujuk kepada konsep *‘ibrah* dan *tamtsil* yang dikemukakan Ibn Taimiyah, bukan kepada *ta’wil*, yakni penafsiran metaforis terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan pendekatan rasional karena yang terakhir ditentang oleh Ibn Taimiyah.²⁰

Fitrah dan Humanisme Religius

Di atas telah disinggung bahwa Cak Nur menggunakan argumen fitrah yang berasal dari Ibn Taimiyah guna menegaskan universalitas nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Selain itu, argumen fitrah juga digunakannya untuk mendukung suatu humanisme religius. Dalam pidato ini Cak Nur memang tidak menyinggung soal humanisme sekuler Barat²¹ sebagai kontras dari humanisme religius yang di-

¹⁹ Madjid, “Kalam Kekhalifahan”, h. 15.

²⁰ Cak Nur menulis: “*In fact, ta’wil, the metaphorical or allegorical interpretation followed by the mutakallimūn and, especially the falāsifa, is condemned by Ibn Taymiyya as one of the worst bid’as.*” See Madjid, “Ibn Taymiyya on Kalam and Falsafa”, h. 82.

²¹ Humanisme sekuler pada dasarnya hanya percaya pada kemampuan akal manusia untuk menyelesaikan segala persoalan hidup ini, dan menolak hal-hal yang bersifat supernatural, termasuk wahyu yang disampaikan Tuhan kepada para

tawarkannya, meskipun Cak Nur sebenarnya juga mengemukakan perlunya humanisme religius yang ditarik dari cerita Adam dan Hawa. Kejatuhan kedua orang ini dari *jannah*, menunjukkan bahwa akal manusia tetap memerlukan bimbingan agama.

Tetapi keniscayaan humanisme religius berdasarkan argumen fitrah lebih jelas dikemukakan Cak Nur dalam pengantar bukunya *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Dalam buku ini Cak Nur bercerita bahwa pada tahun 1985 dia mendapat kesempatan untuk menyampaikan ceramah maulid Nabi di Istana Negara. Dalam ceramahnya itu, Cak Nur mencoba memaparkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam.²² Usai ceramah, Cak Nur mendapatkan sambutan positif dari para pendengar yang hadir. Tetapi di antara mereka ada yang menanyakan: “Mengapa nilai-nilai kemanusiaan universal itu harus dinyatakan dalam ungkapan-ungkapan keagamaan?”²³

Dengan argumen fitrah, pertanyaan di atas dijawab Cak Nur dengan mengatakan bahwa “agama adalah kelanjutan ‘natur’ manusia sendiri, merupakan wujud nyata dari kecenderungan alaminya.” Dengan kata lain, agama adalah kebutuhan hakiki hidup manusia. Jika kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dari agama, maka Cak Nur mengatakan bahwa manusia secara alamiah sudah percaya pada adanya Tuhan “sehingga sebenarnya usaha mendorong manusia untuk percaya kepada Tuhan adalah tindakan berlebihan. (‘Tidak didorongpun manusia telah percaya kepada Tuhan’, begitu kira-kira rumus sederhananya).”²⁴ Argumen fitrah untuk pembuktian eksistensi Tuhan ini sebenarnya juga berasal dari Ibn Tamiyah.²⁵ Tetapi argumen ini kemudian diperkuat Cak Nur dengan menunjuk kepada fenomena komunisme yang meskipun telah berusaha menghapus agama, ternyata tidak berhasil, bahkan komunisme sendiri akhirnya

Nabi. Lihat Paul Kurtz, *In Defense of Secular Humanism* (New York: Prometheus Book, 1983).

²² Naskah ceramah ini diterbitkan dalam Madjid, *Islam, Komodernan*, h. 46-61.

²³ Madjid, *Islam, Doktrin*, h. xvii.

²⁴ Madjid, *Islam, Doktrin*, h. xix.

²⁵ Madjid, “Ibn Taymiyya on Kalam and Falsafa”, h. 134.

menjelma menjadi sejenis agama, di mana tokoh-tokoh komunis menjadi objek pemujaan bagi para pengikutnya.²⁶

Maka kesimpulan akhir dari humanisme Cak Nur, dengan sendirinya, adalah suatu humanisme religius di mana agama dan kemanusiaan menyatu dengan mesra.

Karena itu, sebagaimana nilai kemanusiaan tidak mungkin bertentangan dengan nilai keagamaan, demikian pula nilai keagamaan mustahil berlawanan dengan nilai kemanusiaan. Agama tidak dibuat sebagai penghalang bagi kemanusiaan (Q 22:78). Maka sesuatu yang sejalan dengan nilai kemanusiaan (bermanfaat untuk manusia) tentu akan bertahan di bumi, sedangkan yang tidak sejalan (tidak berguna bagi manusia, muspra bagaikan 'buih') tentu akan sirna (Q 13:17). Agama berasal dari Tuhan, tetapi untuk kepentingan manusia sendiri. Manusia harus berbuat baik demi memperoleh perkenan Tuhan, dan justeru dengan memperoleh perkenan atau ridla Tuhan itu manusia berbuat sebaik-baiknya untuk dirinya sendiri (Q 41:46). Maka sementara Tuhan tidak perlu kepada manusia, tetapi manusia demi kemanusiaannya sendiri memerlukan ridla Tuhan (Q 47:38). Apresiasi Ketuhanan dengan sendirinya menghasilkan apresiasi kemanusiaan (Q 31:12). Tidak adanya salah satu dari kedua aspek itu akan membuat aspek lainnya palsu, tidak sejati.²⁷

Antara Modernisasi dan Keadilan Sosial

²⁶ Argumen yang cukup menarik tentang sikap religius orang-orang komunis dicontohkan Cak Nur dengan patung Kim Il Sung di Korea Utara yang dipuja oleh rakyatnya, dan banyaknya orang berziarah ke museum Lenin di Moskow. Lihat Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 36-37.

²⁷ Madjid, *Islam, Doktrin*, h. xiii.

Pembahasan Cak Nur selanjutnya mengenai kalam kekhalifahan berkisar pada uraian teologis mengenai posisi sentral manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Seperti umumnya pembahasan teologis dalam Islam, titik tekan paling penting terletak pada *tawhīd*, yakni mengesakan Tuhan tanpa sekutu apapun. Dalam hirarki wujud, manusia berada di posisi yang tinggi sebagai khalifah. Maka manusia harus memandang sejajar kepada sesamanya, memandang “ke bawah” kepada alam, dan memandang “ke atas” hanya kepada Tuhan. Dosa menyekutukan Tuhan (*syirk*) adalah dosa besar karena manusia menurunkan derajat kemanusiaannya baik karena tunduk kepada sesama manusia atau tunduk kepada alam yang sebenarnya di bawah dirinya. Dengan menyadari bahwa alam telah ditundukkan (*taskhīr*) Tuhan untuk manusia, maka manusia seharusnya mempelajari hukum-hukum alam yang disebut *taqdir* sebagai sesuatu yang objektif dan bebas dari mitologi. Dengan pandangan ini manusia diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan teknologi bagi keperluan hidupnya.

Di sisi lain, manusia tidak hanya harus mengembangkan ilmu dan teknologi dalam memanfaatkan alam bagi kehidupannya, melainkan juga harus menjaga keseimbangan dan kelestarian alam itu sendiri. Lebih dari itu, telaah ilmiah terhadap alam semesta di mana manusia berusaha menyingkap rahasia hukum alam itu, seharusnya dapat menyadarkan manusia akan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Selain hukum alam, Tuhan juga sudah menetapkan hukum sejarah bagi kehidupan sosial manusia yang disebut *sunnat-u 'Llāh*. Cak Nur kemudian menekankan bahwa keadilan dalam arti keseimbangan adalah hukum kosmis yang berlaku pada alam semesta dan kehidupan manusia. Suatu kekuasaan yang zalim bagaimanapun kuatnya pasti akan hancur karena ia merusak keseimbangan kosmis. Maka tugas manusia adalah menjaga agar keseimbangan itu tetap bertahan, baik dalam alam raya maupun dalam kehidupan manusia. Jika keseimbangan itu mulai rusak, maka manusia ditugaskan untuk memperbaikinya (mereformasinya). Korupsi dan riba disebut Cak Nur sebagai dua cara dalam mengumpulkan harta secara tidak adil. Di sini riba didefinisikan

Cak Nur sebagai “sistem ekonomi yang memungkinkan transaksi dan pemindahan kekayaan dengan dampak penindasan oleh manusia atas manusia.”²⁸

Demikianlah lebih kurang ringkasan dari pemaparan Cak Nur mengenai kekhalifahan manusia. Penyebutan hukum alam dengan *taqdir* dan hukum sejarah dengan *sunnat-u 'Llāh* nampaknya dipengaruhi oleh pandangan Fazlur Rahman, guru Cak Nur sendiri.²⁹ Perbedaan dua term ini, misalnya, tidak dilakukan oleh teolog Muslim Indonesia lainnya, Harun Nasution. Tetapi Harun dan Cak Nur sebenarnya sama-sama ingin memberikan landasan teologis bagi pentingnya kepastian hukum alam guna pengembangan ilmu dan teknologi. Cak Nur bahkan lebih jauh menekankan bahwa penyeledikan terhadap hukum alam itu sama artinya dengan “sekularisasi” atau “devaluasi radikal” terhadap alam yang secara salah disakralkan oleh sebagian manusia.

Dalam menekankan pentingnya hukum alam, Harun Nasution seringkali juga mengaitkannya dengan paham Qadariyah, yakni bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan perbuatannya, baik atau buruk, dan meninggalkan paham Jabariyah yang berpandangan sebaliknya.³⁰ Cukup mengherankan bahwa dalam pidatonya Cak Nur sama sekali tidak menyentuh persoalan ini, meskipun dalam tulisan-tulisannya yang lain ia membicarakannya dengan cukup panjang lebar. Secara umum, Cak Nur dalam masalah ini mengikuti pandangan Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa “Allah telah menciptakan dalam diri manusia kehendak (*irādah*), yang dengan *irādah* itu manusia mampu memilih jalan hidupnya, baik maupun buruk.”³¹ Teori Asy’ari tentang *kasb* (perolehan), yakni bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan, sedangkan

²⁸ Madjid, “Kalam Kekhalifahan”, h. 35.

²⁹ Lihat Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur’ān*, Edisi Kedua (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1989), h. 23; 51-52.

³⁰ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995).

³¹ Madjid, *Islam, Doktrin*, h. 284. Untuk uraian lebih lengkap, lihat Madjid, *Pintu-Pintu*, h. 18-25.

manusia hanya “memperoleh” perbuatan itu pada momen ketika ia menginginkan perbuatan tersebut, dinilai oleh Ibn Taimiyah masih jatuh ke paham Jabariyah.³² Namun Cak Nur sendiri melihat bahwa jika dibandingkan dengan teologi Calvinisme, sebenarnya teori *kasb* Asy’ari masih lebih memberi ruang bagi adanya kebebasan manusia. Maka jika Calvinisme berhasil melahirkan kapitalisme di Eropa, Asy’arisme mestinya lebih bisa.³³

Terlepas dari perbedaan di atas, secara keseluruhan pandangan Harun dan Cak Nur tentang kepastian hukum alam dan hakikat perbuatan manusia mempunyai tujuan yang sejalan, yakni sama-sama berusaha mencari landasan teologis untuk menjustifikasi modernisasi, atau apa yang disebut oleh pemerintah Orde Baru dengan “pembangunan”. Inilah sebabnya mengapa Cak Nur dan Harun dianggap sebagai legitimator Orde Baru. Kalangan muda bahkan melihat bahwa kebanyakan tokoh pemikir Muslim Orde Baru terkena hegemoni teori modernisasi, termasuk Cak Nur dan Harun.³⁴ Kelemahan penting dari teologi ini adalah suatu pengabaian terhadap dampak-dampak negatif dari modernisasi, terutama dalam hal keadilan sosial. Dalam kenyataannya, modernisasi atau pembangunan hanya menguntungkan segelintir elit dan negara-negara maju, sementara massa rakyat tetap dihimpit oleh kemiskinan dan kebodohan. Para pengkritik teologi Cak Nur dan Harun kemudian mengatakan bahwa semestinya teologi yang lebih dibutuhkan adalah teologi yang berorientasi kepada kelas bawah, yakni sejenis teologi pembebasan yang dikembangkan para teolog Katolik di Amerika Latin. Dalam bahasa Masdar F. Mas’udi, daripada teologi meributkan soal “*sunnat-u ‘llāh*” (dalam arti hukum alam), lebih baik mempersoalkan “*sunnat al-sulthān*”, yakni soal struktur kekuasaan yang tidak adil.³⁵

³² Madjid, “Ibn Taymiyya on Kalam and Falsafa”, h. 144-145.

³³ Madjid, *Islam, Doktrin*, h. 602.

³⁴ Lihat Saiful Muzani, “Islam dalam Hegemoni Teori Modernisasi: Telaah Kasus Awal” *Prisma* No.1 Vol. 22 (1993), h. 73-87; dan Mansour Fakihi, “Mencari Teologi untuk Kaum Tertindas (Khidmat dan Kritik untuk Guruku Harun Nasution)” dalam Suminto et al, *Refleksi Pembaharuan*, h. 165-177.

³⁵ Lihat Masdar F. Mas’udi, “Antara Sunnatullah dan Sunnatussultan:

Menurut Steenbrink, Harun Nasution pernah dimintai pendapatnya mengenai “teologi pembebasan” oleh Dawam Rahardjo. Jawaban Harun ternyata mengecewakan karena ia mengatakan bahwa dalam Islam isu-isu yang dibahas oleh teologi pembebasan termasuk dalam bidang ilmu fiqh, bukan ilmu kalam, dan Harun mengaku bukan ahli fiqh, dan karena itu ia tidak bisa memberikan komentar banyak.³⁶ Dawam nampaknya sangat getol mencari padanan teologi pembebasan Katolik dalam pemikiran Islam. Keinginannya kemudian agak terobati dengan karya-karya ‘Ali Syari’ati, Hassan Hanafi dan Asghar Ali Engineer. Perhatian terhadap teologi ini nampak lebih kuat di kalangan anak muda NU, khususnya para aktifis *Lembaga Kajian Islam dan Sosial* (LKIS) Yogyakarta. Pada waktu itu, mereka bahkan mau belajar teologi pembebasan dengan romo-romo Katolik.³⁷ Tetapi entah mengapa, di zaman Orde Baru itu kita akhirnya tidak sempat menyaksikan munculnya seorang teolog sekaliber Cak Nur dan Harun tetapi berorientasi pada pembebasan struktural. Barangkali Masdar F. Mas’udi bisa dianggap cenderung ke arah itu, tetapi baik keluasan garapannya maupun gemanya di masyarakat masih kalah jauh dengan Cak Nur dan Harun.³⁸ Boleh jadi kondisi politik Orde Baru ikut menghambat perkembangan teologi pembebasan tersebut.

Cak Nur sendiri bukannya tidak menyadari kritik-kritik yang dilontarkan kepada dirinya. Tetapi dalam menanggapi soal “pembebasan”, Cak Nur tetap konsisten dengan penekanan pada “*tawhīd*” yang pada level individual membebaskan orang dari tunduk kepada

Catatan Buat Harun Nasution”, *Pelita* (23 Juli 1992).

³⁶ Karel A. Steenbrink, “Patterns of Muslim-Christian Dialogue in Indonesia (1965-1998)” dalam Jacques Waardenburg (ed.), *Muslim-Christian Perceptions of Dialogue Today: Experiences and Expectations* (Leuven: Peeters), h. 102.

³⁷ Untuk telaah singkat mengenai perkembangan teologi pembebasan di kalangan Muslim dan Kristen di Indonesia masa Orde Baru, lihat Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), h. 275-279.

³⁸ Karya Masdar yang paling monumental adalah *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991).

sesuatu apapun selain Allah, termasuk tidak tunduk kepada hawa nafsunya sendiri, sedangkan pada level sosial, semangat *tawhīd* melahirkan upaya pembebasan masyarakat dari belenggu kekuasaan tiranik dalam rangka menegakkan persamaan di antara sesama manusia.³⁹ Sedangkan dalam pidato ini, Cak Nur mengembangkan konsep sunnatullah sebagai hukum sejarah yang dijadikannya basis bagi keniscayaan keadilan sosial. Dalam konteks inilah Cak Nur kemudian mempertanyakan sistem ekonomi sekarang (kapitalis).

Dari sudut pandang ini patut sekali kita mempertanyakan kembali sistem dan politik ekonomi yang kini umum berlaku, seberapa jauh ia mengakibatkan pemindahan kekayaan secara besar-besaran dengan mudah, sehingga mendorong proses pemiskinan pada masyarakat luas, sementara sejumlah kecil manusia menikmati sumber-daya secara melimpah-ruah. Jika jawab terhadap pertanyaan itu membernarkan (*affirmative*), maka sistem yang ada itu adalah sistem riba yang zalim dan harus diakhiri.⁴⁰

Dari kutipan di atas jelas bahwa sebagai seorang teolog Cak Nur juga sangat prihatin dengan persoalan keadilan sosial yang bersifat struktural. Memang kalau kita perhatikan tulisan-tulisan Cak Nur muda, nampak bahwa ia memiliki semangat sosialis yang tinggi. Ia juga menyambut hangat gagasan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut “sosialisme religius”, suatu istilah yang diungkapkan oleh presiden Soeharto sendiri di tahun 1970-an.⁴¹ Tetapi sebagai seorang teolog, Cak Nur memang cenderung berbicara pada tataran abstrak ketimbang rumusan-rumusan praktis bagaimana keadilan seharusnya

³⁹ Lihat “Efek Pembebasan Semangat Tawhid”, dalam Madjid, *Islam Doktrin*, h. 72-92.

⁴⁰ Madjid, “Kalam Kekhalifahan”, h. 35.

⁴¹ Nurcholish Madjid, *Islam, Kerakyatan dan Keindonesian* (Bandung: Mizan, 1993), h. 59-91.

dapat ditegakkan. Mungkin di sini Harun Nasution benar, yakni bahwa isu-isu teologi pembebasan akhirnya harus ditangani fiqh.

Selain itu, uraian Cak Nur tentang keadilan sebagai hukum kosmis barangkali akan lebih terasa kuat seandainya ia menyertakan pula uraian tentang segi-segi negatif dalam diri manusia yang dapat menjerumuskannya kepada tindak kezaliman. Kalau kita perhatikan gambaran hakikat manusia dalam pidato ini, Cak Nur hanya menggambarkan segi-segi positif dan optimis dalam diri manusia saja. Padahal menurut al-Qur'an, manusia juga memiliki banyak kelemahan, seperti rakus dan kikir, tidak sabaran, suka berkeluh kesah, mudah berputus asa jika ditimpa kegagalan, dan mudah menepuk dada jika mendapatkan kesuksesan.⁴² Tetapi dalam ceramah maulid di Istana Negara, ternyata Cak Nur tidak lupa menyinggung soal ini. Dia menyitir salah satu sifat negatif manusia yaitu disebut dalam al-Qur'an, yaitu *'ajalah*.

Titik kelemahan itu, antara lain dan terutama...ialah kecenderungannya untuk berpandangan pendek, ingin cepat merasakan kenikmatan dan kesenangan hidup, mudah tergoda oleh daya tarik sementara suatu benda atau perbuatan. Yaitu titik kelemahan yang disebut dalam Kitab Suci sebagai *'ajalah*, yang makna harfiahnya ialah ketergesa-gesaan, mau serba cepat dalam arti tidak sabaran, tidak tahan uji, tidak tabah dan keburu nafsu.⁴³

Penutup

Kalam kekhalifahan yang dipaparkan Cak Nur nampaknya adalah sebuah upaya merumuskan humanisme berdasarkan doktrin-doktrin teologis Islam. Dalam mengembangkan argumennya, Cak

⁴² Lihat Rahman, *Major Themes*, h. 25-27.

⁴³ Madjid, *Islam, Kemodernan*, h. 54-55. Bandingkan dengan Madjid, *Islam Doktrin*, h. 305-306

Nur cenderung berlaku eklektik dan dalam batas tertentu bahkan terjatuh pada apologi. Di sisi lain, substansi pemikiran teologis yang dikemukakannya memiliki kekuatan yang cukup meyakinkan dalam rangka merumuskan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Memang ada beberapa poin penting yang tidak dimasukkannya dalam pidato ini, tetapi poin-poin itu dapat ditemukan dalam tulisan-tulisannya yang lain. Barangkali situasi politik dari bulan Mei hingga Agustus 1998 telah menyeret Cak Nur kepada kesibukan praktis di lapangan, sehingga ia tidak memiliki waktu yang cukup memadai untuk menulis pidato ini secara lebih komprehensif.

Dalam kondisi bangsa kita sekarang ini, jelas isu-isu kemanusiaan yang dipaparkan Cak Nur masih sangat relevan. Yang amat penting dan mendesak barangkali adalah isu keadilan sosial, khususnya keadilan ekonomi. Cak Nur sudah mewariskan kepada kita dasar-dasar teologis bagi keharusan penegakan keadilan sosial. Maka tugas generasi selanjutnya adalah mengembangkan pemikiran mengenai masalah ini lebih jauh sehingga dapat menyentuh kenyataan konkrit di masyarakat. Barangkali sudah saatnya para pemikir Muslim untuk tidak terpenjara pada pengkaplingan bidang ilmu-ilmu keislaman. Jika hal-hal praktis untuk menegakkan keadilan adalah masalah fiqh, maka bukan berarti bahwa ia begitu saja bisa dilepaskan dari abstraksi teologis. Lebih-lebih, yang kita butuhkan saat ini bahkan bukan sekadar gabungan ilmu kalam, fiqh dan tasawuf, melainkan juga konsultasi dengan hasil-hasil penelitian sosial empiris tentang kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat kita. Alhasil, para pemikir muda yang ingin melanjutkan warisan Cak Nur jangan sampai terkesan hanya membela “kebebasan berpendapat dan berserikat” tetapi lupa menyuarakan “keadilan ekonomi” untuk rakyat. ❖

Mujiburrahman adalah dosen pada IAIN Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.